

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 9 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang: a. bahwa untuk memperlancar komunikasi antar lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah atau antar daerah dipandang perlu mencantumkan alamat lengkap pada Kop Surat Dinas Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72.KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.**

**Pasal 1**

- (1) Kop Naskah Dinas Gubernur memuat sebutan GUBERNUR dengan menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas dan alamat, nomor telepon, nomor faximile serta kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah.
- (2) Bentuk, ukuran dan isi Kop Naskah Dinas Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2008  
**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd**

**H. MARDIYANTO**

=====

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 9 Tahun 2008

TANGGAL : 13 Februari 2008

-----

BENTUK, DAN ISI KOP NASKAH DINAS GUBERNUR

Contoh Kop Naskah Dinas Gubernur.



**GUBERNUR JAWA BARAT**

**Jalan Diponogoro Nomor 22 Bandung kode pos ..... Jawa Barat**

**Telp. (022) 4204483 - 4239450 Fax. (022) 4236347- 4231161**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd**

**H. MARDIYANTO**